

**RENCANA KERJA TAHUNAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DEPOK**



**TAHUN ANGGARAN 2021  
PERUBAHAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2021 Perubahan dapat terselesaikan sebagaimana dijadikan pedoman dan pengendali pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok antara lain penegakan Perda; penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum; serta perlindungan masyarakat.

RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan Tahun Anggaran 2021 Perubahan, sehingga dilakukan penyesuaian pada pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mewujudkan Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius.

Secara substantif RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Satuan Pamong Praja Kota Depok Tahun 2016-2021. RKT ini juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok pada akhir tahun anggaran 2021 perubahan.

Kami menyadari bahwa penyusunan RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2021 perubahan ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran konstruktif dibutuhkan.

Depok, November 2021

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Depok**



**N Lienda Ratnanurdianny, SH., M.Hum**  
NIP.197001271998032004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Dasar Pemikiran	3
	1.4. Permasalahan yang dihadapi	3
	1.5. Prioritas Pembangunan	4
	1.6. Struktur Pemerintahan	4
BAB II	RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5
	2.1. Visi	5
	2.2. Misi	5
	2.3. Tujuan	5
	2.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	6
	2.5. Kebijakan dan Program	7
BAB III	RENCANA KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN	8
	3.1. Sasaran yang dipilih	8
	3.2. Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih	8
	3.3. Program yang terpilih	9
BAB IV	PENUTUP	16

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penyusunan Rencana kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, selanjutnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Selain itu, sebagai wahana proses yang akan memberikan prospektif mengenai apa yang ingin dihasilkan ke depan, memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan dan dapat digunakan untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber daya yang terbatas.

Rencana Kinerja Tahunan bermanfaat untuk menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terinci, membantu pencapaian hasil pelaksanaan program, dapat menjadi suatu *performance agreement*, memudahkan proses pengukuran kinerja, membantu monitoring dan evaluasi kinerja, membantu menetapkan kinerja periode berikutnya, serta memudahkan penetapan spesifikasi pekerjaan atas dasar capaian kinerja.

Dalam penyusunan suatu Rencana Kinerja Tahunan perlu terlebih dahulu ditentukan atau ditetapkan beberapa hal seperti :

1. Mempelajari sasaran berikut indikatornya yang ingin dicapai;
2. Menentukan program/ kegiatan dan mempertimbangkan tingkat kinerja yang dapat dicapai;
3. Mempertimbangkan kemampuan riil pengerahan sumber daya;
4. Menetapkan tingkat kinerja yang ingin dicapai dalam bentuk target;
5. Mengintegrasikan rencana kinerja dengan rencana kerja yang lebih operasional.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 tahun 2008 tentang RPJPD tahun 2006 – 2025.
8. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2016 – 2021 (tanggal 29 Desember 2017).
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.
10. Peraturan Walikota Depok Nomor 110 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

### **1.3. Dasar Pemikiran**

Dasar pemikiran Penyusunan Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2021 Perubahan ini, adalah :

1. Sebagai dokumen kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.
2. Sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok sesuai Program dan Kegiatan.
3. Memberikan gambaran terencana terhadap sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.

### **1.4. Permasalahan yang Dihadapi**

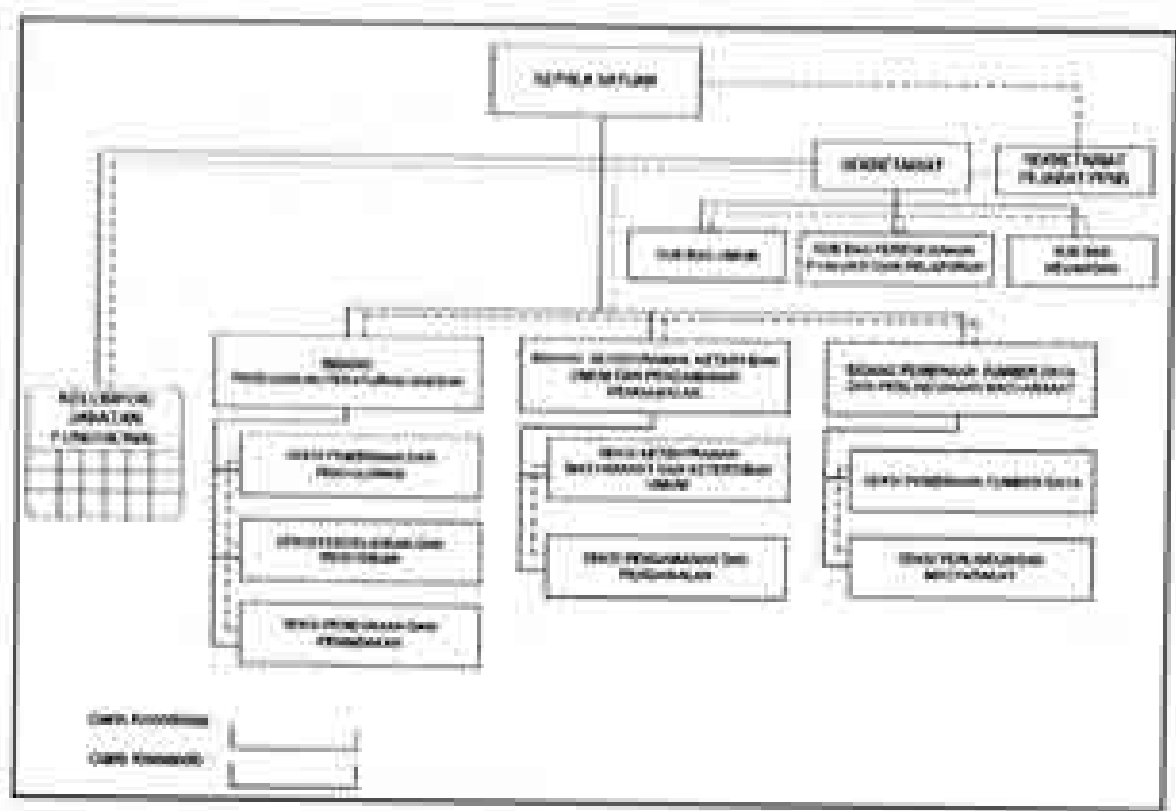
- a. Lemahnya tingkat koordinasi dan kolaborasi antar Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ditandai dengan belum maksimalnya Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian (Birwasdal) pada Dinas pengampu Perda;
- b. Masih ditemui pelanggaran-pelanggaran yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Pembinaan dan pengawasan implementasi Perda Kota Depok yang belum maksimal;
- f. Sejumlah Perda dalam ketentuan pidananya mencantumkan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga dalam pemberkasannya membutuhkan waktu yang relatif lama.

### **1.5. Prioritas Pembangunan**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok mendukung Misi Kota Depok yang ke-1 (satu) yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik.

### 1.6. Struktur Pemerintahan

## STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK



## **BAB II**

### **RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

#### **2.1. Visi Satuan Polisi Pamong Praja**

Visi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Terwujudnya "Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius."

#### **2.2 Misi Satuan Polisi Pamong Praja**

Sebagai penjabaran visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok di atas disusunlah misi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok 2016-2021 yang telah dilakukan penyesuaian dengan Penyusunan RPMJD Perubahan Tahun 2016-2021; sehingga Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok masuk pada Misi Ke-1 RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021, yakni "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan."

#### **2.3. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja**

Tujuan pada misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

**MISI I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.**

Tujuan dari MISI I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Ketertiban Umum.

#### **2.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran**

Sasaran merupakan tolak ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai tujuan. Berikut ini sasaran pada misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2016-2021 :



**MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.**

Tujuan dari MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Ketertiban Umum.

Sasaran dari tujuan MISI 1, dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja Sasaran :

1. Nilai SAKIP Satpol PP.
2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik.
3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP.

2. Meningkatnya Ketertiban Umum

Indikator Kinerja Sasaran :

1. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal.
2. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib.
3. Cakupan Rasio Petugas Linmas.

3. Meningkatnya Ketentraman Masyarakat

Indikator Kinerja Sasaran :

1. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif.
2. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat.

## 2.5 Kebijakan dan Program

Untuk mencapai Sasaran diperlukan suatu kebijakan dan program. Berikut ini adalah Kebijakan dan Program untuk mencapai sasaran dari setiap misi Satuan Polisi Pamong Praja.

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Ketertiban Umum	1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1. Nilai SAKIP Satpol PP	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Persentase Ases Satpol PP kondisi baik	
		3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	
2. Meningkatnya Ketertiban Umum	2. Meningkatnya Ketertiban Umum	4. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		5. Persentase Kawasan Rawan Transibum yang Tertib	
		6. Cakupan Rasio Petugas Linmas	
3. Meningkatnya Kententeraman Masyarakat	3. Meningkatnya Kententeraman Masyarakat	7. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif	
		8. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententeraman Masyarakat	

## **BAB III**

### **RENCANA KINERJA TAHUN 2021**

#### **3.1 Sasaran Yang Terpilih**

Sasaran yang terpilih di tahun 2021 perubahan ini adalah sebanyak 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Ketertiban Umum.
3. Meningkatnya Ketentraman Masyarakat.

Sasaran ini dipergunakan untuk mencapai tujuan dari misi Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2021, sehingga apa yang direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

#### **3.2 Indikator Kinerja Sasaran Yang Terpilih**

Indikator Kinerja dari sasaran yang terpilih pada tahun 2021 Perubahan adalah sebagai berikut :

<b>SASARAN TERPILIH</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN TERPILIH</b>
1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1. Nilai SAKIP Satpol PP
	2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik
	3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP

BASARAN TERPILIH	INDIKATOR KINERJA BASARAN TERPILIH
2. Meningkatnya Ketertiban Umum	4. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal
	5. Persentase Kawasan Rawan Transilban yang Tertib
	6. Cakupan Rasio Petugas Linmas
3. Meningkatnya Ketenteraman Masyarakat	7. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif
	8. Cakupan Patroli Singa Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

### 3.3 Program Yang Terpilih

Jumlah program pada tahun 2021 perubahan sebanyak 2 (dua) program yang didukung 8 (delapan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan pagu indikatif tahun 2021 setelah perubahan Rp. **33.656.390.902,00**.

Ke 2 (dua) Program tersebut antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

Berikut ini adalah tabel daftar program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2021 Perubahan :

**Rencana Kerja Badan Polisi Pamong Praja Kota Depok dan Peningkatan Kemampuan  
Tahun Anggaran 2011 Perubahan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLAK UJUR KEMERJA			ANGGARAN BELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REKAPITULASI PERUBAHAN	KETERANGAN
		CAPAIAN	KELUARAN	HASIL				
1	Dusun Pemeliharaan Bidang Keterseraman dan Keterseluas Usman serta Pelaksanaan Masyarakat  SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  PROGRAM PENGUJIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Integrasi Pemasokan	100%	100%	37.827.033,833	33.836.396,903	14.170.844.731	
			Nilai SAJAP	88		37.827.033,833	33.836.396,903	
		Peningkatan penyediaan administrasi perantara	100%	100%	21.256.396,363	18.894.511,213	14.381.882.261	
		Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%				
	Peningkatan Pegawai yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	40%	0%					

	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Integral Pencapaian	100%	100%	121.880.000	162.340.000	81.980.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Jumlah Dokumen Realis	2	2	83.990.000	47.460.000	(36.470.000)
2	Konditas dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja (SMKPD)	Jumlah Dokumen	4	2	43.000.000	43.000.000	100.000.000
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	-	10.400.973.700	54.483.712.932	(3.971.661.261)
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Sesi PT	80	80	10.439.573.700	34.463.712.530	(1.025.861.261)
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	40%	0%	301.900.000	301.900.000	-
4	Pengadaan Fasilitas Dinas/Geswa Akibat Kebutuhannya	Jumlah PDI, Jumlah PDI, Jumlah Pakaian Dinas Hari-Hari Terbaru	170	0	301.980.000	301.980.000	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Pertumbuhan	100%	50%	1.121.007.800	861.940.750	(159.531.100)
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20	15	31.997.800	31.997.800	-

Manajemen Kinerja Kabupaten  
Mendukung Pembangunan Daerah  
yang Lebih Berkualitas

6	Penyediaan Perlatan dan Peningkatan Kurva	Jenis Alat Tulis Kantor, Jenis Perlatan dan Peningkatan Kurva	33	10	3.185.500,000	344.081,000	(177.419,000)	Eksena
7	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jenis Perlatan Rumah Tangga	20	12	170.000,000	170.000,000	-	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Makanan dan Minuman	1	1	187.000,000	187.000,000	-	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jenis Barang Cetak dan Pengiriman	15	13	93.800,000	93.800,000	-	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SK/PO	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	250	48	360.000,000	277.881,000	(82.119,000)	Eksena
5	Pemeliharaan Ruang Muka Daerah Penumpang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparkor	100%	50%	1.184.745,000	894.665,000	(290.080,000)	
11	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penumpang Dirai atau Kendaraan Dirai (Baterai)	Jumlah Kendaraan Dirai	50	18	1.134.800,000	844.780,000	(290.020,000)	Eksena
12	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peningkatan Gedung Kantor	7	7	49.885,000	49.885,000	-	

5	PROGRAM PEMBIAYAAN KETERANGAN DAN KETERIBUAN UMUM	Cakupan Pergerakan Ponds dan Perseil	100%	40%	18.070.840.040	16.081.877.070	01.370.870
6	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan dan Kelembagaan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rasio Perseil Umum	0,27	0,27	15.540.330.040	13.050.730.070	07.317.700
13	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan dan Kelembagaan Umum melalui Deklarasi dan Cegah Dera, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patrol, Pengawasan, dan Pengawasan (230 orang selama 12 bulan)	Jumlah Sogga, Pa, Pp selama 12 bulan	12	7	12.100.050.040	10.130.330.070	05.094.170
14	Peningkatan dan Kegiatan amon dan Kelembagaan Umum Berdimensi Perseil dan Perseil melalui Perseil dan Peningkatan dan Peningkatan Unpla, Rona dan Kelembagaan Masa	Jumlah Unplakasek Fase Fases yang dilakukan, Jumlah Unplakasek yang dilakukan, Jumlah Perseil dan Perseil yang dilakukan, Jumlah Perseil dan Perseil yang dilakukan, Jumlah Perseil dan Perseil yang dilakukan	10	1	620.050.040	707.101.730	107.101.000

Revisi dan Perubahan  
 2024-2025



		3	4	5	6	7	8	9
15	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Keterseragaman dan Keterlibatan Umum serta Perimbangan Masyarakat, Tingkat Kesejahteraan	Jenis Perayaan Pengamatan Jumlah Geddi Pasukan Tingkat Kota Depok	12	7	60.000.000	60.000.000	1.170.000	
16	Pembudayaan Peribudha Masyarakat dalam rangka Kesetaraan dan Kalkabilitas Umum	Jumlah Anggota Subkomisi Tingkat Kota, Jumlah Anggota Subkomisi yang Belum dan Masih, Jumlah Pengamatan Hari Raya	12	7	2.410.270.000	2.410.270.000		
17	Peningkatan Kapasitas SDM sebagai Peta Pemangangan dan Satuan Peribudha Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berwujud dan Akut Manusia	Jumlah Aparatur Sipil PP yang mengikut Bimtek Jumlah Jabang Pdi PP	72	6	175.000.000	175.000.000		
7	Peningkatan Perilaku Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Desa/Kota	Cakupan Penggalan Porda dan Permal	100%	4%	121.401.100	625.121.000	1.710.000	
18	Sosialisasi Penggalan Perilaku Daerah dan Perilaku Bupati/Walikota	Jumlah Lokasi Sosialisasi Papan Informasi Layanan/Regal	34	6	111.960.000	18.470.000	40.000.000	Ekuaring
19	Pengawasan dan Kalkabilitas terhadap Pelaksanaan Perilaku Daerah dan Perilaku Bupati/Walikota	Jumlah regu Porda 24 jam	27	10	270.000.000	270.000.000		

Berkas Kerja Tahunan  
Kantor Bupati Kota Depok  
Tahun Anggaran 2024

20	Peningkatan dan Pembangunan Perairan Daerah dan Perairan Batas Wilayah Kota	Jumlah bangunan, jumlah Gelar Perahu, jumlah Pemasangan Barang Cetak (Melayu), jumlah perbaikan KTR, jumlah pembelian perahu, dan jumlah Gasing Tiping	20	10	179.636.700	666.661.000	47.311.000	Perencanaan Anggaran Persekolahan Tanjung Sari Subang Socokubuh Perumahan Perumahan Daerah dan Perumahan Bogor/Wali s. Jls
21	Pembinaan Penyedia Pelayanan Negeri Sipil (PNS) Kecamatan/Mota	Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Persekolahan	100%	47%	80.000.000	80.000.000		
		Jumlah PNS	20	9	80.000.000	80.000.000		
<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>37.827.833.833</b>	<b>33.658.396.000</b>	<b>(4.179.444.731)</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman semua jajaran yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2021 perubahan.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan kinerja dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok pada tahun 2021 sebagai pedoman dalam pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.

Dengan demikian kerjasama dan kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dengan Perangkat Daerah yang terkait serta keterlibatan aktif masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius.

Depok, November 2021

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota**

Depok  


**N Lienda Ratnanurdiyanti, SH, M.Hum**  
NIP.197001271998032004